

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki pelayanan publik yang menjadikan salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dalam Undang - undang Republik Indonesi No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PUSAT, 2009), baik tidaknya admnistrasi publik atau pemerintahan dilihat dari seberapa jauh pelayanan publiknya sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Kecenderungan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan birokrasi di Indonesia, terjadi di semua organisasi atau birokrasi pemerintahan, sebagaimana juga yang sering kali dimuat dan diliput dalam berbagai media massa. Kecenderungan tersebut terjadi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pada organisasi birokrasi pemerintahan daerah, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa.

Tekanan pada organisasi sektor publik, terutama organisasi Pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara, dan hal ini mendorong organisasi sektor publik lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka Membentuk organisasi sektor publik dan sistem manajemen berbasis kinerja. Munculnya manajemen kinerja merupakan bagian dari reformasi Manajemen Publik Baru di Eropa dan Negara Maju Eropa Menjadi Anglo-Amerika sejak 1980-an. Fokus dari manajemen berbasis kinerja adalah Pengukuran kinerja organisasi sektor publik ditujukan untuk

mengukur hasil, tidak sekedar mengukur input atau Output saja apalagi di instansi pemerintahan.

Perkembangan pesat dan proses industrialisasi tidak hanya membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional, tetapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan. Hal ini terjadi karena kegiatan pembangunan dan industri tidak memperhatikan daya dukung dan daya dukung lingkungan setempat. Menurut data yang saya dapat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (BPS, 2020) saat ini terdapat kurang lebih 154 perusahaan sektor industri di Mojokerto. Dengan kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas lingkungan semakin menurun akibat pencemaran limbah industri. Contoh tempat yang paling terkena limbah yaitu sungai dan udara.

Salah satu upaya untuk mengendalikan dampak negatif tersebut adalah dengan menyiapkan studi kelayakan lingkungan dalam bentuk AMDAL, UKL dan UPL. Berdasarkan PerMenLH No. P.38 tahun 2019 yang ditetapkan oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nurbaya, 2019), peserta komersial atau sponsor wajib melakukan pemeriksaan kualitas air, udara dan tanah di laboratorium lingkungan. Memperhatikan penurunan kualitas lingkungan, maka tuntutan industri akan pengujian kualitas lingkungan dan pekerjaan pengelolaan lingkungan dilakukan oleh DLH Kabupaten Mojokerto (DLH Kabupaten Mojokerto) melalui PerBup No. Laboratorium Lingkungan UPTD didirikan pada tanggal 3 Maret 2011. Pendirian laboratorium lingkungan ini juga merupakan tugas UU No 3, terkait Dokumen Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewenangan menyusun fasilitas dan standar laboratorium lingkungan.

capacity building bisa diartikan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, Brown (2001:25). Didalam suatu proses pengembangan kapasitas terdapat suatu tingkatan atau level. Mengacu pada teori Leavit sebagai mana dikutip (ALAM, 2015) menjelaskan tingkatan pengembangan kapasitas sebagai berikut:

- a. Tingkat individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika.
- b. Tingkat kelembagaan, meliputi: sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan system pengambilan keputusan,
- c. Tingkat sistem meliputi: peraturanperundang-undangan dan kebijakan pendukung.

Pada UPTD Laoratorium Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto telah melakukan suatu proses pengembangan kapasitas dalam tingkatan yang mengacu pada teori Leavit. Pengembangan kapasitas perlu dilakukan karena dilihat dari segi personel yang sangat minim. Mereka harus sering mengikutkan pelatihan dan sertivikasi agar mereka bisa kompeten dalam bidangnya. Apalagi ada juga tim pengambilan sampel yang hanya lulusan SLTA sederajat. Dengan persoalan yang seperti itu pihak UPTD harus mengikutkan anggotanya untuk ikut pelatihan dan sertivikasi.

Dalam hal sistem mereka masih manual dalam pelayanan. Meskipun pelayanan mereka manual mereka memunculkan suatu regulasi-regulasi baru demi mengembangkan suatu sistem. Untuk sumber daya seperti pralatan dan laboratorium sudah mumpuni dan sudah terakreditasi.

UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengacu undang-undang terbaru dalam menjalankan suatu pelayanan dan tugas masing. Karena undang-undang yang terbaru tentang pengelolaan lingkungan hidup berpotensi dalam proses pengembangan kapasitas dalam tingkat sistem.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengembangan kapasitas di UPTD Lab DLH Kab. Mojokerto?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan kapasitas di UPTD Lab DLH Kab. Mojokerto

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi pengembangan kapasitas yang ada di UPTD Lab DLH Kab. Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan suatu pengembangan kapasitas.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Mendapat wawasan tentang pengembangan kapasitas secara teoritis berdasarkan indikator – indikator yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto, serta melihat dan menilai langsung efektifitas pengembangan kapasitas yang ada di UPTD Lab .

Secara teoritis untuk memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya di bidang ilmu administrasi publik terkait dengan proses pengembangan kapasitas yang ada didalam 3 tingkatan yaitu : (a) tingkat individu , (b) tingkat kelembagaan, dan (c) tingkat sistem, Leavit dalam (Andi Samsu Alam & Ashar Prawitno, 2015)

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat karena bisa memahami secara spesifik dalam pengembangan kapasitas yang ada di UPTD Lab DLH Kab. Mojokerto.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa menjadi jembatan masyarakat yang akan menjadi customer di UPTD Lab Kab. Mojokerto, dan menjadi tolak ukur akan kualitas kinerja kepegawaian disana.
- c. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan membirakan wawasan serta ilmu kepada peneliti, dan penelitian ini semoga menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya atau ada rencana tindak lanjut kedepanya.